

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). Implementasi pengaturan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data pribadi dan/atau dokumen elektronik menurut perspektif hukum positif di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8051-8067.
- Amalia, Adinda R., Annisa N. R. Apriliana, and Hamka H. Arsy. 2023. "Right to be Forgotten: Perspektif Hukum HAM Internasional." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4(2): 1–11.
- Ariesta, Wahyu, and Abdul Sukron. 2024. "Studi Komparasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Uni Eropa dan Indonesia dalam Prinsip The Right To Be Forgotten Menurut Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6(2): 162–77.
- Ariesta, Wahyu, and Abdul Sukron. 2024. "Studi Komparasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Uni Eropa dan Indonesia dalam Prinsip The Right To Be Forgotten Menurut Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6(2): 162–77.
- Arndarnijariah, Faqi Rawni, and Jeferson Kameo. 2024. "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8(1):69–82.
- Astuti, B., dan Daud, M. R. 2023. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6 (2): 205–244.
- Christianto, H. 2020. Konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 175-192.
- Djanggih, H., and N. Qamar. 2018. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13 (1): 10-23.
- Ernasari, N. (2024). Perlindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum Pidana di Era Digital Ditinjau dari Perspektif Implementasi Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 15(2), 163–174. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v15i2.44591>
- Faiz, P. M. 2009. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6 (1): 135-149.
- Hutapea, S. A. 2021. "Right to be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi." *Jurnal Jurisprudencia* 4(1): 1–10.
- Irabiah, Ismail, M. A. Alala, Budi Suswanto, Budi Basrawi, and M. A. A. AM. 2023. "Victim Precipitation pada Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: (Studi Kasus Putusan No. 176/Pid. Sus/2021/PN/Kka)." *Jurnal Hukum Bisnis* 12(03):161–67.
- Mantelero, Alessandro. 2013. "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the Roots of the 'Right to Be Forgotten'." *Computer Law & Security Review* 29 (3): 1–11.
- Munte, A. 2021. "Analisis Keamanan Siber Dan Hukum Dari Perspektif Gender Dan Filsafat Politik Alison M. Jagger." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13 (2): 284-302.
- Nasution, A. V. A., Suteki, S., and Lumbanraja, A. D. 2024. "Prospek Pemenuhan Right to be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 13(2): 1–11.
- Nasution, Ayu V. A., Suteki Suteki, and Andreas D. Lumbanraja. 2024. "Prospek Pemenuhan Right to Be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 13(2): 1–11.

- Noval, S. M. R., & Jamaludin, A. (2020). Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan Dan Potensi Ancaman. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 366-379.
- Pangesti, Angela Ajeng. 2024. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7(2):97–113.
- Ramadaani, K. F., & Muaalifin, M. D. A. 2023. Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 3(1), 18-41.
- Setiyanto, Moh. Amin Choiri. 2011. "Sosialisasi Cyberlaw (Hukum Telematika) pada Dosen dan Mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta." *Ar Risalah* 9 (25): 1–11.
- Setyardi, Heru U. 2024. "Right To Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1): 1096–1108.
- Sinaulan, J. H. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4(1):1–11.
- Triadi, M. 2023. Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 45-64.
- Wibowo, Y., Dyah Purnomo Wulan, I. A., & Ismiyanto, I. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(01), 1–6. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1216>
- Yuanita, A. C. 2022. "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3 (2): 130-142.
- Zazili, Ahmad. 2012. "Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/Phpu. A-Vii/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1: 135-162.

Skripsi/Tesis

- Luthfi, M. Ghali. 2023. *Urgensi Penerapan Pidana Bersyarat bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)*. Skripsi. Universitas Medan Area.

Buku

- Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Ringkasan Disertasi Doktor. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ata Ujan, Andre. 2005. *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisus.
- Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition. St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Dimiyati, K. 2005. *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Dines, Gail. 2010. *Pornland: How Porn Has Hijacked Our Sexuality*. Beacon Press.
- Djafar, Wahyudi, and Komarudin, Alamsyah. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet; Beberapa Penjelasan Kunci*. ELSAM.

- Fuad, Nur. 2017. "Informasi sebagai HAM." Dalam *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia*, edited by Muhammad Zen Al-Faqih. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuady, M. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Iman Sjahputra, S. H. 2021. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Kightlinger, Frank M., Albert, Edward J., and Daniel P. Cooper. 2018. *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*. Council of Europe.
- Kusumaatmadja, M. 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Edisi Kedua (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Liberty.
- Mulyana, Asep. 2015. *Hak atas Informasi dalam Bingkai HAM*. Jakarta: ELSAM.
- Mustafa, Marmi Emmy. 2007. *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dihubungkan Dengan TRiPs-WTO*. Bandung: Alumni.
- Nasrullah, R. 2022. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenada Media.
- Oktana, Rionov. 2023. *Analisis Hukum terhadap Media Sosial dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Raharjo, Agoes. 2002. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, and I. B. Wisa Putra. 2012. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rawls, John. 2019. *Teori Keadilan*. Translated by Uzair Fauzan and Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, 5th ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rosadi, Sulaiman D. 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Shidarta, et al. 2012. *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institute.
- Shita Laksmi, *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2018.
- Situmegang, Sahat Maruli T. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra.
- Soekanto, S. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suteki. 2016. "Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologisnya." Dalam *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum di Indonesia*.

Syaefudin, Muhammad Agus Fajar, Fajar Ari Sudewo, dan Kus Rizkianto. 2021. *Hukum Siber: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Pelokangon, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*. Jakarta: Genta Publishing.

Teguh Prasetyo, S. H. 2019. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Nusamedia.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28G, Pasal 28I.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Pasal 26
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE: Memperkuat ketentuan dalam Pasal 26
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Pasal 26 UU ITE
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Pasal 8, Pasal 43.
6. Makassar District Court. *Case Decision No. 358/Pid.Sus/2024/PN Mks*. 2024. Accessible from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Directory. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Website

Pengadilan Negeri Makassar. *Selamat Datang di Wilayah Zona Integritas Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus*. Diakses melalui <https://pn-makassar.go.id/website/>, pada Senin, 6 Januari 2025, pukul 10.00 WITA.

Pasundan News, "Penetapan Bersejarah Right to Be Forgotten di Indonesia", diakses 15 Mei 2025, <https://pasundannews.com/penetapan-bersejarah-right-to-be-forgotten-di-indonesia/>

Wawancara

Wahyudi Said, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, wawancara, Senin, 6 Januari 2025, pukul 10.00 WITA.